



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VI DPR RI

BIDANG PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI

Rapat Ke	: 13 (Tiga Belas)
Tahun Sidang	: 2024-2025
Masa Persidangan	: I
Jenis Rapat	: Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan RI.
Hari, Tanggal	: Rabu, 20 November 2024
Pukul	: 10.30 WIB
Sifat Rapat	: Terbuka.
Pimpinan Rapat	: Eko Hendro Purnomo, S.Sos/Wakil Ketua Komisi VI DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Dewi Pusporini, S.E., M.E., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a	: 1. Perkenalan Mitra Kerja Komisi VI DPR RI; 2. Penjelasan Mitra Kerja terhadap Program Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2025, dan; 3. Target Penyelesaian Roadmap Kementerian/Lembaga. 4. Pembahasan awal terkait rencana pengesahan Second Protocol to Amend the Agreement Establishing the ASEAN Australia-New Zealand Free Trade Area.
Hadir	: 1. 22 Orang dari 46 Anggota Komisi VI DPR RI; 2. Menteri Perdagangan RI, Bapak Budi Santoso; 3. Wakil Menteri Perdagangan RI, Ibu Dyah Roro Esti Widya Putri. Beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib yang tertuang dalam Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 276 ayat (1), maka Ketua Rapat membuka Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan RI pada Pukul 10.40 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI pada hari Rabu, 20 November 2024, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dibuka oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Bapak Eko Hendro Purnomo, S.Sos.

II. KESIMPULAN

1. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan Menteri Perdagangan RI terkait program kerja Kementerian Perdagangan RI Tahun Anggaran 2025, target penyelesaian roadmap Kementerian Perdagangan RI dan rencana pengesahan *Second Protocol to Amend The Agreement Establishing The ASEAN - Australia - New Zealand Free Trade Area*.
2. Komisi VI DPR RI bersama Menteri Perdagangan RI sepakat untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan RI serta peningkatan kinerja.
3. Komisi VI DPR RI mendorong Kementerian Perdagangan RI untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
 - a) Berperan dalam menjaga stabilitas harga barang dan kebutuhan pokok, terutama saat terjadi lonjakan harga bahan pangan, seperti menjelang liburan Natal dan Tahun Baru serta bulan Ramadhan mendatang
 - b) Memperhatikan dan melaksanakan kebijakan perdagangan yang berkaitan dengan impor dan ekspor, mencakup perjanjian perdagangan bebas dan peraturan yang mengatur komoditas tertentu
 - c) Berfokus pada pengembangan koperasi maupun usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk meningkatkan daya saing dan akses pasar dengan membentuk kebijakan tata niaga dan impor yang berpihak kepada pelaku ekonomi rakyat
 - d) Terus berupaya dalam mendukung pelaku usaha beradaptasi dengan platform e-commerce, mengingat tren digitalisasi dalam perdagangan juga menjadi isu penting
 - e) Aksesibilitas infrastruktur perdagangan yang memadai juga masih menjadi kendala yang harus menjadi perhatian Kementerian Perdagangan, terutama di daerah terpencil.
4. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Perdagangan RI untuk mengkaji ulang Permendag Nomor 8 tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, guna mencegah terjadinya gangguan kinerja dan iklim usaha industri barang sejenis
5. Komisi VI DPR RI mendorong Kementerian Perdagangan RI untuk meningkatkan pemanfaatan kebijakan sistem resi gudang (SRG) bagi produk-produk pertanian.
6. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada Kementerian Perdagangan RI untuk memberikan jawaban tertulis dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja atas pertanyaan Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada Pukul 14.17 WIB.

MENTERI PERDAGANGAN RI

TTD.

BUDI SANTOSO

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,**

TTD.

**EKO HENDRO PURNOMO, S.SOS
A-499**